

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2018 penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 jiwa. Dari data tersebut, artinya jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut Rismawati (2018) pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap kemiskinan.

Suyanto (2013) menyatakan bahwa kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Menurut Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Nurwati (2008) juga mengatakan bahwa masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), pada bulan Maret 2019 ditunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Berikut data jumlah penduduk miskin menurut BPS.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi (ribu jiwa)

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) September 2019
1	Aceh	819,44
2	Sumatera Utara	1 282,04
3	Sumatera Barat	348,22
4	Riau	490,72
5	Jambi	274,32
6	Sumatera Selatan	1 073,74
7	Bengkulu	302,30
8	Lampung	1 063,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	68,38
10	Kepulauan Riau	128,46
11	DKI Jakarta	365,55
12	Jawa Barat	3 399,16

13	Jawa Tengah	3 743,23
14	DI Yogyakarta	448,47
15	Jawa Timur	4 112,25
16	Banten	654,46
17	Bali	163,85
18	Nusa Tenggara Barat	735,96
19	Nusa Tenggara Timur	1 146,32
20	Kalimantan Barat	378,41
21	Kalimantan Tengah	134,59
22	Kalimantan Selatan	192,48
23	Kalimantan Timur	219,92
24	Kalimantan Utara	48,78
25	Sulawesi Utara	191,70
26	Sulawesi Tengah	410,36
27	Sulawesi Selatan	767,80
28	Sulawesi Tenggara	302,58
29	Gorontalo	186,03
30	Sulawesi Barat	151,40
31	Maluku	317,69
32	Maluku Utara	84,60
33	Papua Barat	211,50
34	Papua	926,36
Indonesia		25 674,58

Handayani (2014) menyatakan bahwa kemiskinan tertinggi atau yang berada di zona merah sebagian besar berada di wilayah utara Jawa Timur dan pulau Madura yang berstruktur perekonomian subsisten. Rochana (2012) mengatakan bahwa Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur dan luasnya 5.250 km². Secara administrasi, Madura menjadi wilayah Provinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Berikut persentase penduduk miskin yang terdapat di pulau Madura menurut SDGs (2019).

Tabel 1.2 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Bangkalan	22,57	21,41	21,32	19,59	18,90
Sampang	25,69	24,11	23,56	21,21	20,71
Pamekasan	17,41	16,70	16	14,47	13,95
Sumenep	20,20	20,09	19,62	20,16	19,48

Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, dan munculnya kantong-kantong kemiskinan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat mencari sumber penghidupan alternatif yaitu sektor informal (Rini, 2012). Menurut Oktaviana, Anjuman dan Made (2014) kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia karena ketiadaan pendapat,

kekuasaan dan pilihan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hardiyantina dan Sukardi (2016) menyatakan bahwa hal ini menjadi potret nyata bangsa Indonesia dimana sebagian masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan yang akhirnya mengemis dijadikan sebagai jalan yang efektif untuk mencari kebutuhan dan memenuhi hidup. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bertambahnya masyarakat yang memilih untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain dengan cara menjadi seorang pengemis.

Hardiyantina dan Sukardi (2016) menyatakan bahwa mengemis tidak sekedar dialami oleh masyarakat yang mempunyai masalah dalam bidang ekonomi, tetapi masalah budaya dan sistem sosial merupakan faktor dominan yang ikut andil dalam melahirkan tradisi mengemis. Mengemis lebih disebabkan oleh mentalitas individu yang tidak bisa lepas oleh sikap pragmatis untuk mencapai sesuatu. Mengemis atau perbuatan meminta-minta dititik beratkan pada faktor mental dan sikap malas. Pragmatisme dan cara hidup yang serba pesimis serta instan dalam masyarakat merupakan cikal bakal yang ikut mendorong suburnya budaya mengemis.

Stones (2013) menyatakan bahwa mengemis adalah penerapan jalan terakhir bagi banyak orang, itu biasanya dianggap sebagai pilihan yang lebih dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka daripada menggunakan kegiatan kriminal, seperti mengutil, pencurian, pengedaran narkoba, dan prostitusi. Fenomena mengenai pengemis tentunya sudah tidak lagi asing dimata masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sumenep. Menurut data terakhir yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten dengan jumlah pengemis paling banyak di pulau Madura. Berikut data pengemis di Madura menurut Badan Pusat Statistik (2019).

Tabel 1.3 Jumlah Pengemis di Pulau Madura Menurut Data Badan Pusat Statistik (2019)

No	Kabupaten	Jumlah Pengemis	
		2016	2017
1	Bangkalan	30	13
2	Sampang	14	-
3	Pamekasan	174	-
4	Sumenep	114	114

Fenomena mengenai pengemis di Kabupaten Sumenep selalu menjadi sorotan media di bandingkan 3 Kabupaten di Madura yang lainnya. Maraknya sorotan media terhadap pengemis di Kabupaten Sumenep salah satunya dikarenakan Kabupaten Sumenep memiliki sebuah desa dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis yaitu Desa Pragaan, dimana desa tersebut terkenal dengan julukan kampung pengemis. Detik News (2009) mengatakan bahwa sebanyak 80% dari 9.567 orang dari Desa Pragaan berprofesi sebagai pengemis. Hardiyantina dan Sukardi (2016) menyatakan bahwa berbagai faktor menjadi bagian penting yang menyebabkan masyarakat menjadi pengemis. Anggapan masyarakat terhadap pengemis yang dinilai miskin dan kurang mampu akan terbantah apabila melihat realitas yang terjadi pada desa tersebut. Profesi pengemis ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apa sebenarnya motivasi mereka menjadi pengemis sedangkan dalam konteks ekonomi mereka dikatakan mampu. Media Madura (2018) menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep membenarkan jika pengemis di Kabupaten Sumenep kian hari kian marak dan rata-rata mereka berasal dari Kecamatan Pragaan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, tempat keramaian seperti di simpang empat jalan protokol, area Taman Bunga, serta tempat perbelanjaan menjadi tempat favorit mereka sehingga masyarakat kerap merasa terganggu. Selain itu, pengemis juga kerap beroperasi dengan cara berkeliling ke rumah-rumah atau perkantoran disekitar kota Sumenep dengan menggunakan cara dan modus beraneka ragam.

Selain mengemis di titik-titik tertentu, pengemis yang ada di Kabupaten Sumenep juga mengemis sampai ke Kabupaten lain yang ada di pulau Madura. Oke News (2016) memaparkan bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Bangkalan

mengakui banyak pengemis berkeliaran di wilayahnya untuk meminta belas kasihan. Namun mereka kebanyakan bukan warga Bangkalan, melainkan dari luar Kabupaten Bangkalan seperti Sumenep dan Sampang. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ia pernah menangkap pengemis yang berasal dari salah satu desa di Sumenep, serta menjelaskan bahwa di desa tersebut semua masyarakatnya menjadi pengemis dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai sebuah pekerjaan. Selain itu, Berita Jatim (2019) memaparkan bahwa Kepala Bidang Penegakan Perda dan Penertiban Umum Satpol PP Sampang menyampaikan bahwa setelah dilakukan pendataan para pengemis sekitar 95% pengemis datang dari Pragaan dan Prenduan Sumenep. Mereka pulang pergi setiap hari ke Sampang. Berikut jumlah pengemis yang tertangkap razia menurut data Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.4 Jumlah Pengemis yang Tertangkap Razia Menurut Data Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

Data Pengemis Kabupaten Sumenep yang Terjangkit Razia Tahun 2017-2019		
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
11 orang	28 orang	78 orang

Data Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah pengemis di Kabupaten Sumenep yang tertangkap razia semakin bertambah. Jatim Times (2016) memaparkan bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Sumenep berkata bahwa Satpol PP bersama dengan Dinas Sosial Sumenep, sudah sering melakukan razia terhadap pengemis yang berkeliaran di Sumenep agar berhenti. Namun, keberadaan pengemis di wilayah tersebut tetap masih banyak. Selain itu, ia mengatakan bahwa banyak pengemis yang terkena razia langsung diminta untuk di rehabilitasi dan diberikan keterampilan. Namun, ada sebagian dari mereka yang tidak mau sehingga terpaksa di pulangkan. Meski begitu, masih saja jumlah pengemis terus menjamur.

Portal Madura (2020) memaparkan bahwa Dinas Sosial dalam menangani kasus pengemis yang semakin menjamur di Kabupaten Sumenep melakukan panggilan kepada sejumlah Kepala Desa guna memberikan bantuan sosial kepada pengemis yang berasal dari daerahnya. Selain itu, Dinas Sosial

mengkoordinasikan program peningkatan ekonomi dengan Pemprov Jatim berupa pelatihan bagi gelandangan dan pengemis. Selain itu, penanggulangan terhadap pengemis sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yaitu pada pasal 14 yang menyatakan (a) Melakukan razia terhadap para gelandangan dan pengemis utamanya yang menempati tempat-tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi para gelandangan dan pengemis; (b) Memberikan bimbingan dan atau pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis yang terkena razia untuk tidak menempati sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) Memulangkan para gelandangan dan pengemis yang telah diberi pembinaan ke tempat asalnya sesuai ketentuan yang berlaku; (d) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan langkah-langkah/ upaya pengadaan sarana maupun prasarana penampungan. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk menyadarkan pengemis bahwasanya yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak baik dan untuk memberikan edukasi tentang dampak negatif perbuatan mereka untuk diri sendiri dan untuk orang lain khususnya masyarakat Sumenep. Menurut Hardiyantina dan Sukardi (2016) pendidikan memiliki pengaruh terhadap pembentukan pola pikir, tingkah laku dan sikap. Paling tidak, melalui pembinaan akan diperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan kepribadian yang kreatif, mandiri dan bertanggungjawab. Melalui hal tersebut, individu memiliki potensi yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dengan begitu, manusia dapat mencapai kebahagiaan.

Martin (dalam Jusmiati, 2017) menyatakan bahwa konsep bahagia menurutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu *moral-laden* dan *morally-neutral*. Definisi *moral-laden* menghendaki bahwa tolak ukur kebahagiaan adalah nilai-nilai moral, yang pada intinya adalah kebahagiaan berpusat pada pelaksanaan kebaikan (*virtue*). Disisi lain, definisi kebahagiaan secara netral lebih menekankan pada kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) dalam bentuk kepuasan penuh terhadap hidup atau pencapaian terhadap nikmat yang tinggi. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Boniwell (2012) bahwa kebahagiaan dikenal

dengan istilah kesejahteraan subjektif (*subjective well being*) dalam *positive psychology*.

Pontin, Shwannauer, Tai dan Kinderman (2010) mendefinisikan kesejahteraan subjektif (*subjective well being*) sebagai penilaian diri dari masing-masing individu mengenai gambaran umum *well being* yang merupakan penilaian yang mencakup lingkungan individu, respons perilaku yang dilakukan dan juga konsekuensi subjektif dari saling keterkaitan antara proses tersebut.

Diener (2000) menyatakan bahwa *subjective well being* ditentukan oleh bagaimana cara individu mengevaluasi informasi atau kejadian yang dialami, ia menyebutnya sebagai teori evaluasi. Hal ini melibatkan proses kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi tersebut akan diatur. Diener (2000) menyatakan bahwa cara-cara yang digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa, juga dipengaruhi oleh tempramen, standar yang ditetapkan oleh individu, *mood* saat itu, situasi yang terjadi dan dialami saat itu serta pengaruh budaya. Dengan kata lain *subjective well being* mencakup evaluasi kognitif dan afektif. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti kepuasan kerja, minat dan hubungan. Reaksi afektif dalam *subjective well being* yang dimaksud merupakan reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan.

Pavot dan Diener (dalam Linley dan Joseph, 2004) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* diantaranya ialah perangai atau watak, sifat, karakter pribadi lain, hubungan sosial, pendapatan, pengangguran serta adanya pengaruh sosial budaya. Sehubungan dengan subyek dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut memang tidak terlepas dalam diri pengemis khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep.

Compton (2005) bahwa ia memandang manusia itu positif, sehingga dalam melihat manusia, tidak hanya berfokus pada masalah psikologisnya namun berfokus pada kesejahteraan psikologis, kebermaknaan hidup dan kesehatan mentalnya. McGregor & Little (1998) menyatakan bahwa *subjective well-being*

merupakan salah satu kajian dalam psikologi positif, dan pendekatan teori yang ada salah satunya menggunakan teori *need and goal satisfaction*. Compton (2005) juga menyatakan bahwa orang yang memiliki tujuan penting dan berjuang untuk meraihnya akan menjadi sosok yang lebih energik, mengalami banyak macam emosi positif dan akan merasa bahwa hidupnya sangat bermakna. Selain itu Argyle, Myers dan Diener (dalam Compton, 2005) juga menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang dihubungkan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup, salah satunya adalah pemahaman tentang tujuan dan makna hidup.

Menurut Battista dan Almond (1973) makna hidup didefinisikan secara operasional sebagai *positive life regard*, yang berarti makna hidup adalah keyakinan individu bahwa ia sedang memenuhi kerangka hidup atau tujuan hidup yang memberinya pemahaman yang sangat berharga tentang hidupnya. Frankl (dalam Bukhori, 2012) memaparkan bahwa kebermanaknaan hidup bukan kreasi manusia yang berubah-ubah, tetapi merupakan suatu realitas obyektif dari dirinya. Individu dituntun oleh kata hatinya untuk secara intuitif mendapatkan kebermanaknaan yang sebenarnya. Meskipun lingkungan mendesak dengan pengaruh yang kuat dalam penciptaan dan pemenuhan akan kebermanaknaan hidup, hal itu sangat tergantung pada sikap pribadi masing-masing.

Kebermanaknaan hidup seseorang itu unik dan bersifat personal sebab individu bebas memilih jalannya sendiri untuk menemukan dan menciptakan kebermanaknaan dalam kehidupannya. Battista dan Almond (1973) menyatakan bahwa tidak ada kebermanaknaan hidup sejati yang sama untuk setiap orang dan mereka mengakui adanya cara berbeda-beda dalam pencari rasa hidup bermakna. Teori ini menekankan peranan kritis individu dalam proses mempercayai bukan isi yang ia percayai. Sejalan dengan teori tersebut, Bukhori (2012) mengatakan bahwa menciptakan kebermanaknaan hidup menjadi tanggung jawab individu dan tidak dapat dipercayakan kepada orang lain sebab ia sendiri yang merasakan atau mengalami kebermanaknaan kehidupannya. Bukhori (2012) juga menyatakan bahwa kebermanaknaan hidup berbeda dari orang ke orang lain, dan bahkan dari momen ke momen yang lain. Meskipun demikian, manusia memiliki kemampuan untuk

menemukan kebermaknaan hidup dalam kondisi apapun bahkan ketika harus menghadapi situasi yang sungguh tak menyenangkan.

Bastaman (2007) mengatakan bahwa mengenali dan memahami diri sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi-potensi dan segi-segi positif serta usaha dalam mengurangi segi-segi negatif dalam diri individu. Individu yang memahami dirinya mampu menerima dan menghargai dirinya serta kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap berharga oleh individu itu sendiri. Demikian penilaian individu terhadap dirinya memiliki kaitan erat terhadap kehidupannya serta usaha individu dalam menemukan makna hidup. Sama halnya dengan pengemis, mereka sangat memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan mengenali diri sendiri serta melangkah maju dan mengaktualisasikan diri mereka secara optimal. Dengan begitu mereka mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka dengan mencari pekerjaan yang lebih baik agar mampu meningkatkan makna hidup mereka. Karena menurut Gracia (2007) bekerja juga merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk mengaktualisasikan diri, karena dengan bekerja seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan dan tumbuh serta berkembang sebagai pribadi yang utuh, yang membuat seseorang merasa lebih berarti bagi lingkungannya. Kondisi ini pada akhirnya membuat seseorang yang bekerja bisa menemukan makna dalam kehidupannya melalui bekerja. Frankl (dalam Koeswara, 1992) menganggap bekerja sebagai salah satu cara untuk menemukan makna hidup.

Budiraharjo (1997) mengatakan bahwa menghayati makna hidup berarti seseorang akan mengetahui tujuan hidupnya dan akan bisa mengatasi hampir semua permasalahan yang dihadapinya. Battista dan Almond (1973) memaparkan bahwa ketika seseorang menyatakan bahwa kehidupannya bermakna ini mengimplikasikan bahwa ia memperjuangkan beberapa konsep kebermaknaan hidup, memiliki sebuah kerangka kerja atau memperoleh tujuan hidup, melihat diri sendiri terpenuhi atau sedang dalam proses pemenuhan tujuan hidup serta merasakan "*fulfillment*" atau kesempatan untuk pengalaman emosi yang mendatangkan kebermaknaan hidup. Frankl (2004) mengatakan bahwa setiap

manusia, tidak peduli siapapun dan sebagai apapun dirinya, pastilah suatu saat akan mempertanyakan apa arti dan makna dari kehidupan yang dijalannya. Pencarian akan makna ini menjadi pusat dari dinamika kepribadian manusia. Keinginan akan arti atau makna dalam kehidupan ini menjadi kekuatan motivasi yang mendasar dalam diri manusia. Setiap kehidupan memiliki makna dan kehidupan merupakan suatu tugas yang harus dijalani.

Siti Maisaroh (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Makna Hidup dan Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara makna hidup dan kesejahteraan psikologis. Sumbangan efektif makna hidup terhadap kesejahteraan psikologis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta adalah sebesar 52,2% yang dapat dilihat dari *R square* sebesar 0,522, sedangkan 47,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti usia, jenis kelamin, budaya, serta faktor pendidikan, kepribadian dan dukungan sosial.

Monica Mulyani Dewi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Makna Hidup dengan Kesejahteraan Psikologis pada Pelayan Gereja di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kristus Raja Salatiga mendapatkan hasil bahwa makna hidup dan kesejahteraan psikologis memiliki hubungan positif. Makna hidup memiliki nilai rata-rata sebesar 69,57 sehingga dapat dikatakan bahwa makna hidup pada pelayan gereja di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kristus Raja termasuk individu dalam kategori tinggi. Sedangkan kesejahteraan psikologis memiliki nilai rata-rata sebesar 28,02 sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan psikologis pada pelayan gereja di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kristus Raja termasuk individu dalam kategori tinggi.

Leonardus Dimas Aditya (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Tujuan Hidup dan *Subjective Well Being* pada Mahasiswa Dewasa Awal mendapatkan hasil bahwa tujuan hidup dan *subjective well being* memiliki hubungan positif. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil analisis korelasi antara tujuan hidup dan aspek-aspek *subjective well being*. Berdasarkan hasil analisis korelasi, tujuan hidup dan kepuasan hidup memiliki korelasi positif ($r = 0,399$) begitu pula antara tujuan hidup dan emosi positif ($r = 0,511$), sedangkan tujuan

hidup dan emosi negatif memiliki korelasi negatif ($r = -0,401$). Hal ini menunjukkan seseorang yang memiliki tujuan hidup cenderung memiliki kepuasan hidup yang tinggi dan lebih banyak merasakan emosi positif dibandingkan emosi negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup dan *subjective well being* memiliki korelasi positif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah terdapat hubungan antara Makna Hidup dengan Kesejahteraan Subjektif pada pengemis di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Makna Hidup dengan Kesejahteraan Subjektif pada pengemis di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan bagi keilmuan psikologi khususnya pada bidang psikologi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pentingnya makna hidup dalam kehidupan seseorang agar bahagia dan merasa puas dalam hidupnya untuk menggapai kesejahteraan subjektif.

2. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi cerminan bagi masyarakat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai makna hidup dalam kaitannya dengan kesejahteraan subjektif seseorang, serta menjadi informasi yang penting bagi masyarakat agar bersama-sama membantu pemerintah khususnya Dinas Sosial untuk mengurangi jumlah pengemis di Kabupaten Sumenep.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah referensi serta landasan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai topik atau tema yang sama yaitu mengenai pengemis maupun variabel yang sama yaitu mengenai makna hidup dan kesejahteraan subjektif seseorang.